

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN  
DILAKUKAN OLEH SUPERVISOR SALES  
PT.MITRA CIPTA JAYA MEDAN  
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 30/Pid.B/2022/PN Mdn)**

**Iriani\***  
**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag\*\***  
**Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H\*\*\***

**ABSTRAK**

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penggelapan dalam jabatan, bagaimana pertanggungjawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Supervisor Sales di PT. Mitra Cipta Jaya Medan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mdn.

Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah terhadap terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya..

Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan.**

\*Mahasiswa Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

\*\*Dosen Pembimbing I Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

\*\*Dosen Pembimbing II Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF EMBASSY IN OFFICE  
COMMITTED BY SALES SUPERVISORPT. MITRA  
CIPTA JAYA MEDAN  
(Analysis of Medan District Court Decision No. 30/Pid.B/2022/PN Mdn)**

**Iriani\***  
**Prof. Dr. Mustamam, M.Ag\*\***  
**Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H\*\*\***

**ABSTRACT**

*The crime of embezzlement which is a crime often occurs in various fields and even the perpetrators are in various layers of society. The formulation of the problem in this thesis is how the legal arrangements for the crime of office embezzlement continue, what is the criminal responsibility for the perpetrators of the crime of embezzlement in office in decision Number 30/Pid.B/2022/PN Mdn, what are the considerations of judges in deciding cases of embezzlement in position on an ongoing basis according to decision Number 30/Pid.B/2022/PN Mdn.*

*Writing this thesis uses the library research method to examine secondary data by analyzing the decision case Number 30/Pid.B/2022/PN Mdn. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are systematically compiled and analyzed qualitatively.*

*Legal arrangements for the crime of embezzlement of office are regulated in Article 374 of the Criminal Code. The occurrence of criminal acts of embezzlement in positions related to assets and objects, there is a crime known as embezzlement where abuse of trust dominates as the main element in the occurrence of this crime. The criminal responsibility for the perpetrators of the crime of embezzlement in office is that the defendant is sentenced to a prison sentence of 2 (two) years. The actions committed by the defendant clearly violated the provisions stipulated in Article 374 of the Criminal Code, the elements of which are*

*The conclusion from the discussion is that the judge's legal considerations in the application of criminal sanctions for the crime of embezzlement in office in decision Number 30/Pid.B/2022/PN Mdn against the perpetrators of the crime of embezzlement in office can be held accountable for the actions committed with the consideration that at the time of committing the act the defendant aware of the consequences, the perpetrator in carrying out his actions is in a healthy condition and is capable of considering his actions. The Panel of Judges in the trial did not find things that could erase criminal responsibility, either justifying reasons or forgiving reasons..*

**Keywords: Crime, Embezzlement, Position.**

*\*Student of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*

*\*\*Supervisor I of Law Program, Islamic University of North Sumatra*

*\*\*Supervisor II of Law Program, Islamic University of North Sumatra.*